

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0260/O/1994**

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1993/1994**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan menerbitkan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah;
 a. Nomor 27 Tahun 1990;
 b. Nomor 28 Tahun 1990;
 c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
 a. Nomor 44 Tahun 1974;
 b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
 c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 e. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Pebruari 1983;
 f. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
 g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 h. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
 i. Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/1/94 tanggal 28 September 1994.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994.

(SMK) Negeri serta menerbitkan SMP dan SMA Swasta di beberapa Propinsi di Indonesia tahun pelajaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 3 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- | | | |
|------------------|--------|-------------|
| a. TK | Negeri | 69 buah; |
| b. SMP | Negeri | 8.773 buah; |
| c. SMA | Negeri | 2.399 buah; |
| d. SMIK | Negeri | 28 buah; |
| e. SMT Pertanian | Negeri | 42 buah; |
| f. SMK | Negeri | 86 buah. |

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

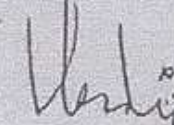
1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
11. Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan

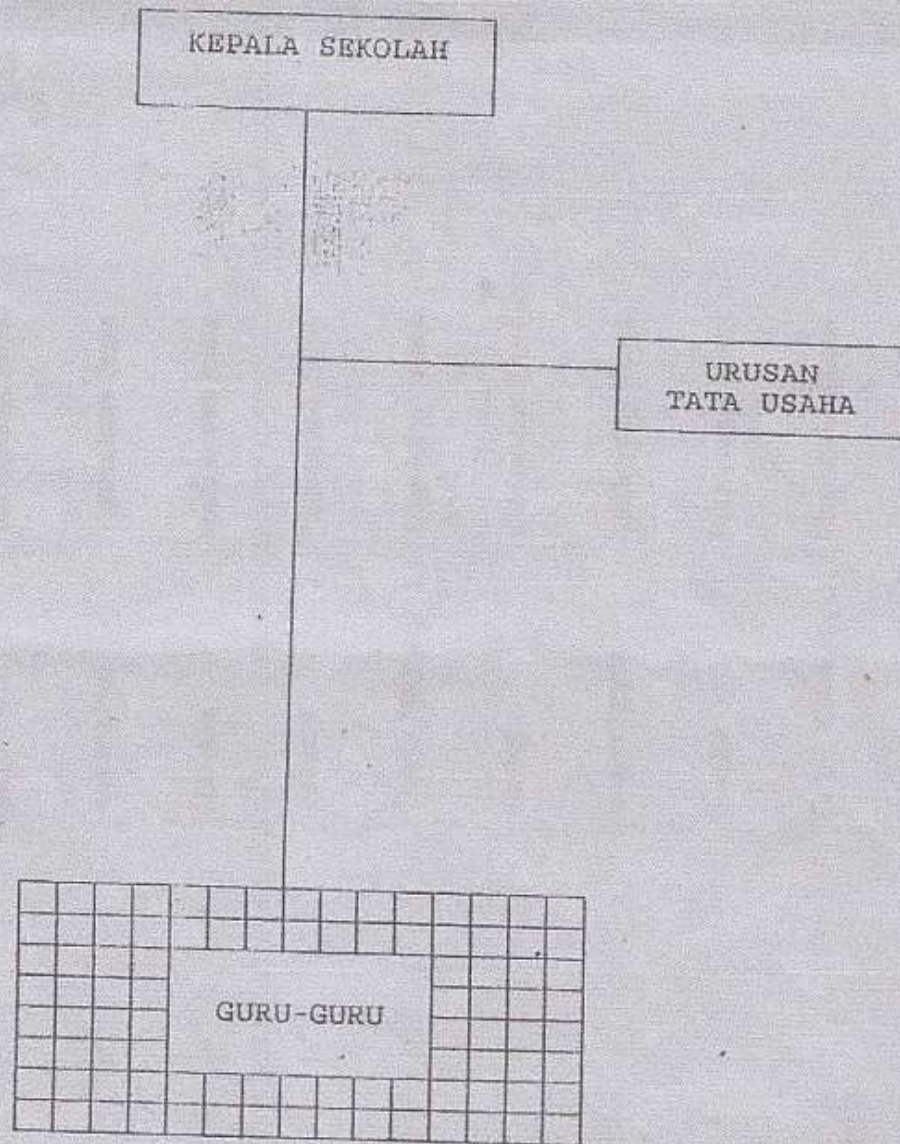


Mardiyah

NIP 130344753



STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Mardiyah
NIP 13034453

1	2	3	4	5	6	7
19.	SULAWESI SELATAN					
A.	PEMBUKAAN					
		1. SMP Negeri 3 Soppeng Riaja	-	Soppeng Riaja	Kabupaten Barru	09.1.2.1038.23.01.19.5110 09.1.2.1038.23.01.19.5120 09.1.2.1038.23.01.19.5150 09.1.2.1038.23.01.19.5210 09.1.2.1038.23.01.19.5220 09.1.2.1038.23.01.19.5230 09.1.2.1038.23.01.19.5250 09.1.2.1038.23.01.19.5350
		2. SMP Negeri 2 Libureng	-	Libureng	Kabupaten Bone	
		3. SMP Negeri 3 Lappariaja	-	Lappariaja	Kabupaten Bone	
		4. SMP Negeri 2 Salomekko	-	Salomekko	Kabupaten Bone	
		5. SMP Negeri 2 Sabulue	-	Sabulue	Kabupaten Bone	
		6. SMP Negeri 3 Sabulue	-	Sabulue	Kabupaten Bone	
		7. SMP Negeri 6 Watampone	-	Tanete Riattang	Kabupaten Bone	
		8. SMP Negeri 3 Baroka	-	Baroka	Kabupaten Enrekang	
		9. SMP Negeri 2 Bontonompo	-	Bontonompo	Kabupaten Gowa	
		10. SMP Negeri 4 Somba Opu	-	Somba Opu	Kabupaten Gowa	
		11. SMP Negeri 4 Tinggi Moncong	-	Tinggi Moncong	Kabupaten Gowa	
		12. SMP Negeri 3 Bajeng	-	Bajeng	Kabupaten Gowa	

1	2	3	4	5	6	7
27.	TIMOR TIMUR					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Pembina Baucau	-	Baucau	Kabupaten Baucau	09.1.1.1022.23.01.27.5110 09.1.1.1022.23.01.27.5120 09.1.1.1022.23.01.27.5150 09.1.1.1022.23.01.27.5210 09.1.1.1022.23.01.27.5220 09.1.1.1022.23.01.27.5230 09.1.1.1022.23.01.27.5250 09.1.1.1022.23.01.27.5350
		2. SMP Negeri 1 Maubise	-	Maubise	Kabupaten Ainaro	09.1.2.1038.23.01.27.5110 09.1.2.1038.23.01.27.5120 09.1.2.1038.23.01.27.5150 09.1.2.1038.23.01.27.5210 09.1.2.1038.23.01.27.5220 09.1.2.1038.23.01.27.5230 09.1.2.1038.23.01.27.5250 09.1.2.1038.23.01.27.5350
		3. SMP Negeri 4 Suai	-	Suai	Kabupaten Covallima	
		4. SMA Negeri 2 Maliana	-	Maliana	Kabupaten Bobonaro	

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Pelanggaran Tindakan



Mardiyah
NIP. 130344353

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ctd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Watampone, Email : disdik_bone@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
Nomor : 107 Tahun 2022

TENTANG
PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM LINGKUP
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. Sehubungan dengan tidak ditemukannya Dokumen Pendirian Awal Sekolah Dasar yang pernah diterbitkan sebelumnya maka perlu dilakukan pembaharuan penetapan izin operasional Sekolah
- b. Bahwa Sekolah (Satuan Pendidikan) yang dimaksud telah beroperasi dan menamatkan murid dan akan mengikuti proses akreditasi sekolah serta telah memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan yang berlaku
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b maka maka dipandang perlu untuk diterbitkan Keputusan Pembaharuan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Tahun 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Keputusan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2016 tentang Rincian, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Memperbaharui izin Operasional Kepada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini
- Kedua : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berkewenangan menyelenggarakan proses Pendidikan dan pengajaran sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah maka Pemberian Izin tersebut pada Diktum "Kesatu" akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 22 April 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Drs. ANDI FAJARUDDIN, M.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650915 198603 1 018

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di watampone;
2. Ketua Badan Akreditasi Nasional Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Koordinator Pelaksana Akreditasi Kabupaten Bone di Watampone
4. Peringgal.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone

Nomor : 107 tanggal 22 April 2022

Tentang : PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE TAHUN 2022

DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN YANG DIPERBAHARUI IZIN OPERASIONALNYA TAHUN 2022

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	JENJANG	ALAMAT	DESA/KEL	KECAMATAN
1	40302977	SD INPRES 3/77 JALING	SD	Jaling	Jaling	AWANGPONE
2	40310487	SD INPRES 3/77 CUMPIGA	SD	CUMPIGA	Cumpiga	AWANGPONE
3	40302645	SD NEGERI 53 LATEKKO	SD	PADAALO	Lattikko	AWANGPONE
4	40310601	SD NEGERI 214 WATU	SD	WATU	Watu	BAREBBO
5	40310593	SD NEGERI 206 APALA	SD	APALA	Apala	BAREBBO
6	40310539	SD INPRES 6/75 KADING	SD	Kading	Kading	BAREBBO
7	40310484	SD INPRES 3/77 APALA	SD	Apala	Apala	BAREBBO
8	40302649	SD NEGERI 76 WATU	SD	Watu	Watu	CENRANA
9	40302679	SD NEGERI 85 LABOTTO	SD	Cakkaware	Cakkaware	CENRANA
10	40302406	SD NEGERI 198 CINENNUNG	SD	Luppereng	Cinennung	CINA
11	40302449	SD INPRES 6/80 KAWERANG	SD	Kawerang	Kawerang	CINA
12	40302452	SD INPRES 7/83 TANETE	SD	Tanete	Tanete	CINA
13	40302372	SD NEGERI 205 PADANG LOANG	SD	Padang Loang	Padang Loang	CINA
14	40310548	SD INPRES 6/75 WALENRENG	SD	Lapechang	Walenreng	CINA
15	40302989	SD INPRES 3/77 TAWAROE	SD	Jln poros wajo	Tawaroe	DUA BOCCOE
16	40310636	SD NEGERI 90 PAKKASALO	SD	Jl.pendidikan No.4 Polejiwa	Pakkasalo	DUA BOCCOE
17	40302461	SD NEGERI 100 MELLE	SD	Lawareng	Melle	DUA BOCCOE
18	40302685	SD NEGERI 91 ULOE	SD	Jln.Berdikari No.6	Uloe	DUA BOCCOE
19	40302905	SD INPRES 6/75 PATTIRO	SD	Pattiro	Pattiro	DUA BOCCOE
20	40302892	SD INPRES 4/82 UNYI	SD	Unyi	Unnyi	DUA BOCCOE
21	40302689	SD NEGERI 95 SOLO	SD	Desa Solo	Solo	DUA BOCCOE
22	40302686	SD NEGERI 92 ULOE	SD	Jl. Berdikari	Uloe	DUA BOCCOE
23	40302737	SD INPRES 10/73 UNYI	SD	Jl.petta Nompoo No.9	Unnyi	DUA BOCCOE
24	40302919	SD INPRES 5/81 PATTIRO	SD	Tono	Pattiro	DUA BOCCOE
25	40310621	SD NEGERI 277 PALATTAE	SD	Jl. Ahmad Yani No 73	Palattae	KAHU

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	JENJANG	ALAMAT	DESA/KEL	KECAMATAN
128	40302582	SMP NEGERI 4 AWANGPONE	SMP	Kajuara	Kajuara	AWANGPONE
129	40302593	SMP NEGERI 2 BAREBBO	SMP	Kading	Kading	BAREBBO
130	40316443	SMP NEGERI 4 BAREBBO	SMP	KAJAOLALIDONG	Kajaolaliddong	BAREBBO
131	40316449	SMPN SATAP 6 BONTOCANI	SMP	-	Ere Cinnong	BONTOCANI
132	40314129	SMP NEGERI 4 BONTOCANI	SMP	Desa Langi	Langi	BONTOCANI
133	40302594	SMP NEGERI 2 CENRANA	SMP	Batutanre	Cakkeware	CENRANA
134	40314128	SMP NEGERI 4 CENRANA	SMP	Perangeng	Lebongnge	CENRANA
135	40302595	SMP NEGERI 2 CINA	SMP	Jl. poros Bone - Sinjai	Tanete Harapan	CINA
136	40316453	SMP NEGERI 5 LAPPARIAJA	SMP	MATTAMPAWALIE	Mattampa Walie	LAPPARIAJA
137	69788235	SMPN SATAP 7 LIBURENG	SMP	DESA BARINGENG	Baringeng	LIBURENG
138	69788251	SMPN SATAP 8 LIBURENG	SMP	MATTIRO BULU	Mattiro Bulu	LIBURENG
139	40310686	SMP NEGERI 4 MARE	SMP	Lakukang	Lakukang	MARE
140	40316455	SMP NEGERI 1 PATIMPENG	SMP	Maddanreng Pulu	Maddanrengpulu	PATIMPENG
141	69788236	SMPN SATAP 5 PONRE	SMP	BOLLI	Bolli	PONRE
142	69765086	SMPN SATAP 5 SIBULUE	SMP	TADANG PALIE	Tadang Palie	SIBULUE
143	40302585	SMP NEGERI 4 SIBULUE	SMP	Kajuara	Pakkasalo	SIBULUE
144	69788234	SMPN SATAP 6 SIBULUE	SMP	MALLUSETASI	Mallusetasi	SIBULUE
145	40302589	SMP NEGERI 6 WATAMPONE	SMP	Jl. Lapawawoi Kr. Sigeri	Biru	TANETE RIATTANG
146	40302592	SMP NEGERI 2 WATAMPONE	SMP	Jl. G. Bawakaraeng	Watampone	TANETE RIATTANG
147	40316459	SMP NEGERI 8 WATAMPONE	SMP	Bulu Tempe	Bulu Tempe	TANETE RIATTANG BARAT
148	40316460	SMP NEGERI 9 WATAMPONE	SMP	POLEWALI	Polewali	TANETE RIATTANG BARAT
149	40317254	SMPN SATAP 1 TELLU LIMPOE	SMP	DESA TAPONG	Tapong	TELLU LIMPOE

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 22 April 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



Drs. ANDI RAJARUDDIN, M.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650915 198603 1 018